PERLINDUNGAN HAK JANDA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS GAJI BEKAS SUAMINYA

Muhammad Khambali¹: Yasmirah Mandasari Saragih²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta¹
Jalan Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Umbulharjo, Kota Yogyakarta
Email: hmkhambali@yahoo.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan²
Jalan Jendral Gatot Subroto Km 4.5 Medan
Email: yasmirahmandasari@gmail.com

Abstract

Marriage is the inner-born bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Supreme Godhead. But if in a relationship between husband and wife can not achieve that goal, then marriage can be cut off. One way of breaking up marriage is divorce. Divorce is a necessary catastrophe in order not to cause another catastrophe of greater danger. Divorce should only be done when in an emergency not to cause greater mudllarat. Divorce resulted in a wife becoming a widow. The civil servant (husband) who divorces his wife must give up some of his salary for the livelihood of his ex-wife and their children. Salary distribution to ex-wife is not granted if the divorce is due to: adulterous wife, and / or wife commits cruel or severe persecution both inborn and inwardly to the husband, and / or wife to intoxicated drunkards, compactors and gamblers, and / or wives has left husband for 2 (two) consecutive years without husband's permission and without valid reason.

Keywords: marriage, divorce, widow rights of civil servants.

Abstrak

Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun jika dalam pergaulan antara suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan tersebut, maka perkawinan dapat diputus. Salah satu cara putusnya perkawinan adalah perceraian. Perceraian merupakan suatu malapetaka yang perlu agar tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian seharusnya hanya dilakukan ketika dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan *mudllarat* yang lebih besar. Perceraian berakibat seorang isteri menjadi janda. Pegawai Negeri Sipil pria (suami) yang menceraikan isterinya harus menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya (jadanya) dan anak-anak mereka. Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila perceraian disebabkan karena: isteri berzina, dan/atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau isteri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau isteri telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah.

Kata kunci: perkawinan, perceraian, hak janda pegawai negeri sipil.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun jika dalam pergaulan antara suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan tersebut, maka perkawinan dapat diputus. Salah satu cara putusnya perkawinan adalah perceraian.

Perceraian seharusnya hanya dilaksanakan sebagai tindakan terakhir setelah segala usaha dan daya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kehidupan perkawinan yang ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan perceraian. Perceraian merupakan suatu malapetaka yang perlu agar tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian seharusnya hanya dilakukan ketika dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar. Oleh karena itu, perceraian merupakan pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.¹

Perceraian berakibat seorang isteri menjadi janda. Menurut Kamus Umum

Bahasa Indonesia, janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya.² Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai perceraian, sebagai berikut:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- (2) Perceraian harus ada cukup alasan yang mendasarinya.

Alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 12.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1996, hlm. 400.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus meminta izin terlebih dahulu kepada pejabat secara tertulis. Permintaan izin tersebut harus mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa pejabat adalah:

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;

3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank Milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara;
8. Pimpinan Bank Milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;

Dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 angka 4 huruf b disebutkan lebih lanjut yang dimaksud dengan pejabat, yaitu:

- (1) Menteri;
- (2) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- (3) Jaksa Agung;
- (4) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
- (5) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- (6) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- (7) Pimpinan Bank Milik Negara;
- (8) Pimpinan Bank Milik Daerah;
- (9) Pimpinan Badan Usaha Milik Negara;
- (10) Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;

(11) Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983.

Perceraian dapat diizinkan oleh pejabat jika berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. Hal-hal yang melarang pejabat memberikan izin untuk bercerai adalah:

- a. Apabila bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- b. Apabila tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- c. Apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau

d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pegawai Negeri Sipil pria (suami) yang menceraikan isterinya harus menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya (jasanya) dan anak-anak mereka. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil berbunyi, sebagai berikut:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya;

- (3) Apabila dari perkawinan tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

Akan tetapi pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila perceraian disebabkan karena:

- a. Isteri berzina, dan atau
- b. Isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau
- c. Isteri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau
- d. Isteri telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah.

Pegawai Negeri Sipil pria tetap harus menyerahkan sebagian gajinya kepada bekas isterinya, meskipun permintaan cerai datang dari isteri.

Hal tersebut dilaksanakan jika isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah.

Penyerahan bagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada bekas isterinya dilakukan sampai dengan bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi. Adapun yang dimaksud dengan gaji, menurut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 angka I angka 4 huruf g terdiri dari:

- (1) Gaji pokok;
- (2) Tunjangan keluarga;
- (3) Tunjangan jabatan (kalau ada);
- (4) Tunjangan perbaikan penghasilan;
- (5) Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.

Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji tersebut di atas, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi tersebut termaktub dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980

tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terdiri atas:

1. Penurunan pangkat pada tingkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
2. Pembebasan dari jabatan.
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Oleh karena kekhususan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penulisan makalah ini dengan pembatasan permasalahan putusnya perkawinan yang mengakibatkan seorang isteri menjadi janda karena terjadinya perceraian, dan perlindungan hak janda atas gaji bekas suaminya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas, rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pelaksanaan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian dan penyerahan hak janda Pegawai Negeri Sipil atas gaji bekas suaminya?

3. Bagaimana perlindungan hak janda Pegawai Negeri Sipil atas gaji bekas suaminya?

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan³, dengan mengkaji mengenai berbagai obyek penelitian yang berupa semua norma hukum yang berkaitan dengan mekanisme perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis norma hukum yang berkaitan dengan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder tersebut dikumpulkan sesuai dengan obyek yang ditulis. Kemudian semua bahan hukum yang sudah terkumpul diinventarisir dan diidentifikasi sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab segala permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum yang telah diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis dengan menggunakan tahapan berpikir sistematis guna menemukan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13-14.

jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pegawai Negeri Sipil sebagai warga negara Indonesia berlaku pula baginya peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi warga negara Indonesia pada umumnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil. Disamping secara khusus, ada peraturan perundang-undangan yang mengikat Pegawai Negeri Sipil, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pengertian, alasan, akibat, dan tata-cara perceraian yang diatur bagi warga negara Indonesia pada umumnya berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun hal-hal khusus yang diatur/ditentukan dapat mengesampingkan ketentuan yang

bersifat umum, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Dengan kata lain, apabila dalam peraturan/ketentuan khusus yang mengikat Pegawai Negeri Sipil, maka yang dipergunakan adalah peraturan/ketentuan yang bersifat khusus. Sebagaimana perkawinan pada umumnya, perkawinan seorang Pegawai Negeri Sipil dapat pula putus ataupun bubar. Hal yang menyebabkan putusnya perkawinan juga sama, yakni kematian, perceraian, ataupun atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang berupa perceraian harus berdasarkan alasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Alasan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan, sebagai berikut:

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
 - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.

Namun demikian seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan isteri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu, izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan. Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristeri lebih dari seorang.

Dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 22 Desember 1990 di bawah Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil angka II angka 5 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila

ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Tata-cara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan beragama Islam, maka Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama, Bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama selain Islam, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri.

Tata-cara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sama dengan tata-cara perceraian pada umumnya. Hanya saja bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku peraturan administratif khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sebagai diatur oleh Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pemeriksaan oleh sidang Pengadilan dalam sengketa perkawinan di Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bagi yang beragama selain Islam pemeriksaan dilakukan oleh sidang pengadilan perdata

di Pengadilan Negeri. Proses dan prosedur pengajuan serta pemeriksaan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri sama dengan proses dan prosedur gugatan perdata biasa, yakni:

1. Pendaftaran gugatan perceraian;
2. Upaya damai;
3. Jawaban/eksepsi atas gugatan penggugat oleh tergugat.
4. Replik oleh penggugat;
5. Duplik oleh tergugat;
6. Pembuktian;
7. Kesimpulan;
8. Putusan;
9. Upaya .

Perceraian melalui Pengadilan Agama dikenal ada 2 (dua) macam, yakni:

1. Permohonan cerai talak oleh suami, sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Permohonan tersebut antara lain memuat:
 - 1) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon dan termohon;
 - 2) Alasan-alasan diajukannya permohonan perceraian;

b. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas permohonan, sidang Pengadilan digelar untuk memeriksa permohonan tersebut. Sidang dilaksanakan dengan sidang tertutup. Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian. Apabila upaya damai tidak berhasil, maka permohonan dikabulkan sepanjang terpenuhi alasan-alasan suami untuk menjatuhkan talak.

c. Permohonan untuk mengucapkan ikrar talak tersebut dilaksanakan oleh suami. Jika 6 (enam) bulan sejak penetapan Pengadilan suami tidak hadir untuk mengucapkan ikrar talak, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut.

d. Isteri yang ditalak dapat menggunakan upaya hukum berupa banding dan kasasi.

2. Gugatan cerai oleh isteri, sebagai berikut:

- a. Penggugat (isteri) atau kuasanya mengajukan gugatan melalui Pengadilan. Gugatan tersebut harus memuat:
 - 1) Nama, umur, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat;
 - 2) Alasan-alasan mengajukan gugatan (posita/fundamentum petendi);
- b. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya berkas gugatan, pemeriksaan dengan sidang tertutup dilakukan oleh Pengadilan dengan hadirnya kedua belah pihak atau kuasa mereka. Jika pada sidang pertama penggugat tidak hadir maka gugatan gugur, sebaliknya jika yang tidak hadir adalah tergugat maka Pengadilan memutuskan dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*)
- c. Apabila perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan dilanjutkan, dan dalam setiap sidang Hakim mengupayakan agar mereka berdamai.
- d. Hakim memberikan putusan “dikabulkan” atau “ditolak” ataupun “tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- e. Atas putusan tersebut para pihak dapat mempergunakan upaya hukum banding dan kasasi.

Adapun proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, permohonan ataupun gugatan yang diajukan melalui Pengadilan harus disertakan pula surat izin dari Pejabat (atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 26 April 1983 di bawah Nomor 08/SE/1983 tentang

Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 22 Desember 1990 di bawah Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam angka II angka 1 sampai 3 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 22 Desember 1990 di bawah Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil diatur, sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.
3. Pegawai Negeri Sipil pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan uraian tertulis adanya gugatan dari suami atau isterinya untuk mendapat surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian.

Akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil

Akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil menyangkut mengenai hubungan bekas suami isteri, anak, dan harta-benda adalah sama dengan akibat perceraian pada umumnya sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Disamping itu, secara khusus dengan terjadinya perceraian Pegawai Negeri Sipil mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan pelaksanaannya.

Perceraian Pegawai Negeri Sipil dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan izin dari Pejabat.
2. Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari Pejabat.

Ad.1. Perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan izin dari Pejabat.

Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai akibat timbulkan hak dan kewajiban, sebagai berikut:

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perceraian harus melaporkan kepada atasan atau Pejabat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak menyampaikan laporan dimaksud, maka dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian berkewajiban untuk menyerahkan sebagian gajinya kepada bekas isterinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan angka III angka 19 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 26 April 1983 di bawah Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 22 Desember 1990 di bawah Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya

untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, yakni sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

- 2) Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami-isteri yang bersangkutan, maka pembagian gaji diatur menurut kesepakatan bersama.

Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Kecuali apabila isteri meminta cerai karena dimadu dan/atau suami berzina, dan/atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri dan/atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah.

Ad.2. Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari Pejabat

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa izin tertulis dari Pejabat mengakibatkan yang bersangkutan dikenai sanksi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi hukuman disiplin berat dimaksud adalah:

- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Pembebasan dari jabatan;
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Adapun tata-cara penyerahan gaji sebagai hak janda Pegawai Negeri Sipil dan/atau anak-anaknya, diatur dalam angka III angka 27 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 26 April 1983 di bawah Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

Pembagian gaji sebagai tersebut di atas, adalah menjadi kewajiban masing-masing Pejabat yang bersangkutan, atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan yang menandatangani daftar gaji adalah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Dalam angka II angka 18 dan 19 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 22 Desember 1990 di bawah Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

18. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas isteri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.
19. Bekas isteri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa atau dapat meminta untuk dikirimkan keadanya.

Hak janda Pegawai Negeri Sipil atas gaji bekas suaminya hapus jika ia kawin lagi, sebagaimana ditentukan oleh angka III angka 21 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 26 April 1983 di bawah Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Perlindungan terhadap hak janda Pegawai Negeri Sipil diatur oleh peraturan perundang-undangan dan penerapannya dilaksanakan oleh Pejabat dan/atau badan

peradilan. Adapun cara penyerahan hak bekas isteri Pegawai Negeri Sipil bagian gaji tersebut dilakukan dengan cara:

1. Diambil sendiri oleh bekas isteri (janda) Pegawai Negeri Sipil kepada petugas penggajian dengan tanda-terima untuk itu.
2. Diambilkan oleh bekas suami (Pegawai Negeri Sipil yang menceraikannya) dan diantarkan kepada bekas isterinya.

PENUTUP

Ada beberapa hal yang menurut peneliti perlu dikemukakan sebagai saran ataupun kritik, sebagai berikut:

1. Bahwa ada hal positif dengan diberlakukannya peraturan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dalam hal perkawinan dan perceraian, yakni perlindungan terhadap wanita yang amanah dan berbudi pekerti luhur, agar tidak diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Akan tetapi persoalan hukumnya adalah permasalahan bukti fisik. Apabila dengan itikad tidak baik peraturan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat untuk membenaran perilaku sewenang-wenang oleh pihak suami maupun isteri.
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat beberapa hal yang mungkin dapat timbul sebagai permasalahan, yakni:

- a. Di dalam peraturan tersebut tidak diatur mengenai sanksi bekas isteri yang tidak amanah, tidak melakukan kewajiban pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak mereka yang ikut kepadanya.
- b. Menurut peneliti tidak masuk akal, bahwa bekas suami tetap berkewajiban memberi penghidupan kepada bekas isterinya, selama bekas isterinya belum kawin lagi. Padahal kewajiban bekas suami ini tidak disertai dengan hak atas bekas isterinya. Apabila bekas isteri melakukan kawin *sirri* (kawin di bawah tangan) dengan pria lain, maka perkawinan tersebut tidak

dapat menghapus kewajiban bekas suaminya yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. Bahwa sangatlah bijaksana jika peraturan tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut ditinjau kembali dan disempurnakan secara berkeadilan bermartabat, agar terpenuhi rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Bimo Walgito, 1984, *Bimbingan dan Konsuling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan

- Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1994, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1975, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurkan*.
- Djamil Latif, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djuhaendah Hasan, 1988, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU Nomor 1/1974*, Bandung: Armico.
- Muchsan, 1986, *Hukum Kepegawaian*, Yogyakarta: Liberty.
- Roihan Rasyid, 1994, *Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanintyo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R, 1996, *RIB/HIR dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia.
- Subekti, R, dan kawan-kawan, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, edisi revisi, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research, Jilid 1*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Syahroni, Ridwan, 1986, *Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS*, Jakarta: PT Media Sarana Pers.
- Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Perundang-undang**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-

- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 26 April 1983 di bawah Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 22 Desember 1990 di bawah Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Kamus**
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Simorangkir, J.C.T., dan kawan-kawan, 1995, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Termorshuizen, Marjanne, 1999, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Yarkes, David, 1989, *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language*, New York: Gramercy Books.
- Majalah**
- Khoirudin Nasution, 1999, "Perdebatan Sekitar Fungsi Pencatatan Perkawinan: Studi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, Nomor 1.
- Varia Peradilan, Tahun VI, Nomor 73, Oktober 1991.